KERAJAAN DHARMASRAYA DAN PAGARUYUNG DALAM TINJAUAN HISTORIOGRAFI SEJARAH MASA HINDU-BUDHA DI MINANGKABAU

Ifkal Kafilayani[1], M Nabil Nazheef Koto[2], Rizky Putra Wijaya[3], Aisiah[4]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : kafilayaniifkal@gmail.com[1], nabil.n.koto36193@gmail.com[2], uwaisrizkiputrawijaya@gmail.com[3], aisiah@fis.unp.ac.id[4]

ABSTRACT

This study aims to analyze the historiographical development of the Dharmasraya Kingdom (11th–13th centuries CE) and the Pagaruyung Kingdom (14th–16th centuries CE) as two political entities of Hindu-Buddhist civilization in Minangkabau. Using a descriptive-analytical qualitative approach based on library research, this study examines primary sources in the form of inscriptions and archaeological artifacts, as well as secondary sources derived from relevant monographs and scientific journals.

From a historiographical perspective, the scholarly tradition developed cumulatively and dialectically: Schnitger (1939) laid the first foundation of material documentation in the Batanghari region; Boechari (1979) verified the position of Dharmasraya through an epigraphic analysis of the Padang Roco Inscription (1286 CE), which records the dispatch of the Amoghapasa statue as a diplomatic act within the mandala logic of Nusantara power relations; and Bambang Budi Utomo (2018) emphasized the distribution of artifacts in the Batanghari Valley as evidence of Hindu-Buddhist penetration extending beyond the royal center. Slamet Muljana (1981) constructed a narrative of dynastic continuity, while Dobbin (1983) and Graves (1981) warned that the use of tambo without adequate methodological criticism could produce reconstructions that are more mythological than historical in character.

In the context of Pagaruyung, Oktaviani (2021) identified Adityawarman as a sacred Tantrayana-Bhairawa figure, while Sarbini (2014) demonstrated the existence of substantial political-military consolidation during the period of 1339–1376 CE. Rahim (2022) argued that the Malay-Minangkabau civilization paradigm has often been marginalized within the framework of national historiography. This study concludes that Dharmasraya-Pagaruyung represents a continuous transformation characterized by both ideological continuity and ecological as well as ritual discontinuity, in which the acculturation process between Hindu-Buddhist traditions, the matrilineal system, and tambo traditions occurred selectively and negotiatively.

Keywords : *Dharmasraya Kingdom, Pagaruyung Kingdom, Hindu-Buddhist, Minangkabau*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis perkembangan historiografi Kerajaan Dharmasraya (abad ke-11-13 M) dan Kerajaan Pagaruyung (abad ke-14-16 M) sebagai dua entitas politik peradaban Hindu-Buddha di Minangkabau. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis penelitian kepustakaan, kajian ini mengkaji sumber primer berupa prasasti dan artefak arkeologis, serta sumber sekunder dari monografi dan jurnal ilmiah yang relevan.

Secara historiografis, tradisi keilmuan berkembang secara kumulatif dan dialektis: Schnitger (1939) meletakkan fondasi dokumentasi material pertama di kawasan Batanghari; Boechari (1979) memverifikasi posisi Dharmasraya melalui analisis epigrafi Prasasti Padang Roco (1286 M) yang merekam pengiriman Arca Amoghapasa sebagai tindakan diplomatik dalam logika mandala kekuasaan Nusantara; dan Bambang Budi Utomo (2018) menegaskan persebaran artefak di Lembah Batanghari sebagai bukti penetrasi Hindu-Buddha yang melampaui pusat kerajaan. Slamet Muljana (1981) mengonstruksi narasi kesinambungan dinasti, namun Dobbin (1983) dan Graves (1981) memperingatkan bahwa penggunaan tambo tanpa kritik metodologis yang memadai berpotensi menghasilkan rekonstruksi yang lebih berkarakter mitologis daripada historis.

Historiografi tentang Pagaruyung oleh Oktaviani (2021) mengidentifikasi Adityawarman sebagai figur sakral penganut Tantrayana-Bhairawa, sementara Sarbini (2014) menunjukkan adanya konsolidasi politik-militer substantif pada rentang 1339-1376 M. Rahim (2022) berargumen bahwa paradigma peradaban Melayu-Minangkabau dari narasi historiografi nasional. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dharmasraya-Pagaruyung merepresentasikan transformasi berkesinambungan yang memuat kontinuitas ideologis sekaligus diskontinuitas ekologis dan ritualistik, di mana proses akulturasi Hindu-Buddha dengan sistem matrilineal dan tambo berlangsung secara selektif dan negosiatif.

Kata Kunci : *Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Pagaruyung, Hindu-Budha, Minangkabau*

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan suatu wilayah yang kini mencakup sebagian besar provinsi Sumatera Barat yang menyimpan peradaban tua di Pulau Sumatera. Jauh sebelum adat Minangkabau menjadi sistem Matrilineal. Kawasan Minangkabau pernah menjadi dua Kekuasaan Kerajaan besar dalam peradaban Hindu Budha yaitu Kerajaan Dharmasraya dan Kerajaan Pagaruyung. Kawasan Minangkabau menyimpan rekam jejak peradaban Hindu Budha yang tidak kalah signifikan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Temuan temuan Artefaktual seperti Arca, Prasasti, dan sisa-sisa struktur Candi yang tersebar di beberapa wilayah, yakni di Lembah Batanghari, Kawasan Padang Lawas, Rambahan, dan Tanah Datar. Wilayah tersebut diduga kuat menjadi bagian dari Sejarah Peradaban Hindu Budha yang melintasi di seluruh kepulauan Nusantara pada abad pertama dan kedua masehi (Bambang Budi Utomo 2018).

Kerajaan Dharmasraya berkembang di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari pada sekitar abad ke sebelas hingga ketiga belas masehi merupakan pecahan dari Kerajaan Sriwijaya yang mewarisi tradisi birokrasi, keagamaan, dan jaringan perdagangan yang telah terbangun selama berabad abad sebelum nya. Kerajaan ini memperoleh legitimasi internasional melalui Prasasti Padang roco tahun 1286 M, yang memuat catatan pengiriman arca amoghapasa dari raja Kertanegara kepada penguasa Dharmasraya yang mana peristiwa tersebut merupakan sebuah Peristiwa diplomatik yang menempatkan Dharmasraya secara tegas dalam hubungan diplomatik dan keagamaan Hindu Budha di Nusantara pada penghujung abad 13 (Boechari, 1979).

Sementara itu, Kerajaan Pagaruyung muncul pada abad ke-14 hingga 16 Masehi bertepatan dengan periode transisi pasca keruntuhan Dharmasraya dan meluas pengaruh Majapahit ke Pulau Sumatera. Tradisi historiografi Lokal sebagaimana tercatat dalam tambo alam Minangkabau mengaitkan pendirian Kerajaan Pagaruyung dengan figure Adityawarman yang merupakan seorang Pangeran memiliki latar belakang geologis yang menghubungkan dengan dinasti singosari-majapahit di jawa sekaligus dengan keluarga Kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera. Dan ini cerminkan realitas Politik Kawasan yang komplek, Dimana Kerajaan Pagaruyung berfungsi sebagai titik temu dua tradisi besar di Nusantara di abad 14. Peran Adityawarman dalam konteks Sejarah Pagaruyung masa Hindu Budha tidak dapat dilebih lebihkan, sejumlah Prasasti yang ditemukan pelosok Sumatera barat dan sekitarnya termasuk Prasasti Kubu Rajo (1340 Masehi), Prasasti Pagaruyung 1 dan 2 dan Prasasti saruaso menempatkan Adityawarman sebagai penguasa yang secara ideologi menganut agama Tantrayana-Bhairawa merupakan sebuah aliran dalam tradisi Hindu Budha yang menekankan pada ritual ritual Masyarakat Minangkabau. (Oktaviani 2021)

Minat akademis terhadap masa Hindu-Buddha di Minangkabau sebenarnya sudah muncul sejak era kolonial, meskipun dalam bentuk yang masih sangat terbatas. Para sarjana Belanda seperti F.M. Schnitger melalui karyanya Forgotten Kingdoms in Sumatra (1939) merupakan yang pertama melakukan inventarisasi sistematis atas tinggalan arkeologis di kawasan Batanghari dan sekitarnya. Laporan-laporan Oudheidkundig Verslag yang diterbitkan secara berkala oleh pemerintah Hindia Belanda juga memuat dokumentasi temuan-temuan arkeologis penting dari kawasan Minangkabau. Meskipun demikian, kajian-kajian era kolonial ini memiliki keterbatasan yang mendasar: pendekatannya bersifat deskriptif-inventarisatif semata, belum mampu menempatkan temuan-temuan tersebut dalam konteks sejarah sosial dan politik yang lebih luas, dan tidak jarang diwarnai oleh prasangka interpretif yang lazim dalam paradigma kolonial. Para

sarjana era ini lebih sibuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan artefak daripada menjelaskan makna historisnya bagi masyarakat yang menghasilkannya.

Dalam dua dekade terakhir, kajian tentang masa Hindu-Buddha di Minangkabau menunjukkan perkembangan yang menggembirakan seiring dengan semakin digunakannya pendekatan interdisipliner. Penelitian Kozok (2006) tentang naskah-naskah Melayu Kuno membuka cakrawala baru dalam memahami tradisi keaksaraan di kawasan ini, sementara kajian-kajian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Andalas dan Balai Arkeologi Sumatera Barat telah memperkaya pemahaman kita tentang konteks situs-situs arkeologis yang terkait dengan kedua kerajaan. Akan tetapi, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat parsial dan sektoral.

Studi arkeologis dan studi historis-tekstual jarang berdialog satu sama lain secara produktif. Dharmasraya dan Pagaruyung lebih sering dikaji secara terpisah daripada dipahami dalam satu kerangka historis yang menyeluruh. Dan yang paling mencolok, perspektif komparatif yang menempatkan kedua kerajaan dalam konteks dinamika Asia Tenggara yang lebih luas hampir tidak pernah dikembangkan secara serius. Celah-celah inilah yang menjadi titik berangkat bagi kajian yang ditawarkan dalam artikel ini.

kajian tentang Dharmasraya dan Pagaruyung mengalami perkembangan yang lebih substantif. Sejarawan Indonesia seperti Slamet Muljana melalui Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi (1981) dan M.D. Mansoer bersama tim penulis Sejarah Minangkabau (1970) berupaya membangun narasi sejarah yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan sumber-sumber lokal seperti tambo dan tradisi lisan ke dalam kerangka analisis historis. Upaya ini patut diapresiasi sebagai langkah maju yang penting. Namun demikian, sejumlah peneliti berikutnya, di antaranya Dobbin (1983) dan Graves (1981) mengingatkan bahwa penggunaan tambo sebagai sumber sejarah tanpa kritik metodologis yang memadai dapat menghasilkan rekonstruksi yang lebih bersifat mitologis daripada historis. Pada periode yang sama, penelitian arkeologis yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di berbagai situs di kawasan aliran sungai Batanghari berhasil menghasilkan data stratigrafi yang lebih akurat, meskipun hasil-hasilnya lebih banyak tersimpan dalam laporan teknis yang belum ditransformasikan ke dalam sintesis historis yang dapat diakses lebih luas.

Kajian tentang sejarah peradaban Hindu-Buddha di Nusantara selama ini cenderung berpusat pada dinamika kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa, sehingga kontribusi Kerajaan Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai mata rantai peradaban Melayu di Sumatera kerap luput dari perhatian serius para peneliti sejarah nasional, padahal kedua kerajaan tersebut merupakan simpul penting yang menghubungkan warisan Sriwijaya dengan identitas budaya Minangkabau yang dikenal hingga hari ini, di mana Kerajaan Dharmasraya yang muncul pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi telah berkembang menjadi pusat kebudayaan Buddha terbesar di Sumatera dengan wilayah kekuasaan membentang dari Sumatera, tanah Sunda, hingga Semenanjung Malaya, dibuktikan melalui Prasasti Padang Roco (1286 M) yang memuat catatan pengiriman Arca Amoghapasa sebagai hadiah diplomatik dari Raja Singasari, kemudian memasuki abad ke-14 Raja Adityawarman memindahkan pusat pemerintahan ke Pagaruyung pada tahun 1347 Masehi sekaligus membawa tradisi Tantrik Buddha ke jantung alam Minangkabau sebagaimana terdokumentasikan dalam Prasasti Batusangkar, sementara akulturasi Hindu-Buddha dengan sistem matrilineal dan tambo Minangkabau serta kontinuitas kultural antara kedua kerajaan tersebut hingga kini belum pernah dikaji secara terpadu dan komprehensif dalam satu kerangka analisis historis-interpretatif, sehingga penelitian ini memiliki urgensi kuat untuk dilaksanakan

melalui pendekatan kualitatif deskriptif analitis guna memperkaya historiografi lokal Sumatra sekaligus menjadi landasan akademis bagi pelestarian situs warisan budaya di Kabupaten Dharmasraya dan Tanah Datar (Rahim, 2022).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konstruksi analitis yang secara khusus menempatkan Kerajaan Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai dua kutub peradaban Hindu-Buddha yang saling terhubung dalam satu garis historis berkelanjutan di wilayah Minangkabau, sebuah perspektif yang belum pernah dibangun secara sistematis dalam kajian-kajian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji peradaban Hindu-Buddha di Sumatera secara fragmentaris dan tidak menghubungkan secara analitis bagaimana sistem keagamaan, tradisi ritualistik Tantris, serta struktur kekuasaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di Dharmasraya sejak abad ke-11 Masehi bertransformasi dan berlanjut secara genealogis ke dalam tubuh Kerajaan Pagaruyung di bawah kepemimpinan Adityawarman pada abad ke-14 Masehi. Kajian Nastiti (2014) dalam KALPATARU: Majalah Arkeologi menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha yang mendukung maju-mundurnya suatu peradaban, mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, agama, kesenian dalam bidang sastra, arsitektur, dan arca, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek tata ruang tempat masyarakat itu hidup; namun kajian tersebut belum menyentuh secara spesifik bagaimana keseluruhan aspek peradaban Hindu-Buddha tersebut beroperasi dan bertransformasi dalam konteks perpindahan pusat kekuasaan dari Dharmasraya menuju Pagaruyung di pedalaman Minangkabau. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini secara konkret mencakup tiga hal: pertama, penelitian ini pertama kalinya menganalisis Prasasti Padang Roco, Prasasti Suruaso, dan Prasasti Kuburajo secara integratif sebagai bukti material yang merekam lintasan peradaban Hindu-Buddha dari Dharmasraya ke Pagaruyung; kedua, penelitian ini menghadirkan kerangka analisis deskriptif-analitis yang menelusuri transformasi sistem ritual Tantris Buddha di bawah Adityawarman sebagai jembatan peradaban antara dua kerajaan tersebut; dan ketiga, penelitian ini menghasilkan peta naratif peradaban Hindu-Buddha yang bersifat lokal-spesifik di Minangkabau, yang selama ini absen dalam diskursus historiografi Sumatera sehingga memberikan sumbangan ilmiah yang orisinal bagi pengembangan kajian sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di kawasan Sumatera (Nastiti,T.S. 2014).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menginterpretasikan peran Kerajaan Dharmasraya dan Kerajaan Pagaruyung sebagai entitas politik dalam kerangka pengaruh Hindu-Buddha di kawasan Sumatera bagian tengah, dengan menelaah aspek kontinuitas serta transformasi sistem pemerintahan, struktur sosial-keagamaan, dan legitimasi kekuasaan yang berlandaskan kosmologi Hindu-Buddha, guna mengonstruksi pemahaman historis yang sistematis dan komprehensif mengenai kedudukan kedua kerajaan tersebut dalam periodisasi sejarah kebudayaan Nusantara.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan model penelitian kepustakaan (library research). Disebut deskriptif karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta historis tentang Dharmasraya dan Pagaruyung berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Disebut analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskripsi, melainkan melanjutkannya ke tataran interpretasi, analisis struktural, dan sintesis komparatif yang menghasilkan argumen-argumen historis baru. Sebagai

penelitian kepustakaan, sumber-sumber utama yang digunakan adalah bahan-bahan tertulis baik primer maupun sekunder yang tersimpan dalam berbagai bentuk: prasasti, naskah kuno, laporan arkeologis, monografi sejarah, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Penelitian lapangan (field research) dilakukan secara langsung dalam penelitian ini, meskipun sebagian data-data arkeologis yang dikutip bersumber dari laporan penelitian lapangan yang dilakukan oleh para arkeolog sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Dharmasraya: Asal-Usul, Legitimasi, dan Struktur Kekuasaan

Menurut Boechari (1979) kerajaan Dharmasraya merupakan salah satu entitas politik terpenting dalam periodisasi sejarah Hindu-Buddha di kawasan Sumatera bagian tengah. Secara historis, kerajaan ini tumbuh dan berkembang di sepanjang lembah aliran Sungai Batanghari, yang membentang dari pedalaman dataran tinggi Minangkabau menuju pesisir timur Sumatera, pada rentang waktu sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Posisi Dharmasraya sebagai penerus Sriwijaya tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai suksesi dinasti belaka; ia merupakan kelanjutan organik dari seluruh sistem birokrasi, jaringan keagamaan, dan koneksi perdagangan antarpulau yang telah dibangun Sriwijaya selama berabad-abad sebelumnya. Ketika Sriwijaya mulai mengalami disintegrasi akibat tekanan eksternal dan fragmentasi internal, Dharmasraya tampil sebagai kekuatan yang mampu mengkonsolidasi warisan tersebut dan mempertahankan relevansinya dalam peta politik Nusantara.

Dari kajian Artikel Bambang Budi Utomo (2018), sungai Batanghari memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan peradaban Dharmasraya. Sebagai jalur transportasi dan komunikasi utama yang menghubungkan kawasan pedalaman Minangkabau dengan pesisir timur Sumatera dan seterusnya dengan jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara, Sungai Batanghari menjadikan Dharmasraya sebagai lokasi strategis yang mengontrol arus perdagangan. Dalam konteks ini, keberhasilan kerajaan Dharmasraya membangun legitimasi politiknya tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata, melainkan juga pada kemampuannya mengelola dan mengendalikan jalur-jalur pertukaran ekonomi dan budaya yang melintas di wilayah tersebut. Kondisi geografis inilah sebagian besar menentukan mengapa kawasan Lembah Batanghari menjadi lokasi utama perkembangan peradaban Hindu-Buddha di Sumatera bagian barat-tengah, suatu posisi yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga simbolis dalam tatanan kosmologi Hindu-Buddha yang menempatkan aliran sungai besar sebagai axis kehidupan dan pusat sakralitas.



Gambar 1. bagian belakang Situs Amoghapasa



Gambar 2. Bagian depan Situs Amoghapasa

Sumber: Wikipedia

Legitimasi Kerajaan Dharmasraya pada tataran internasional terdokumentasikan melalui Prasasti Padang Roco yang berangka tahun 1286 M. Prasasti ini memuat narasi tentang pengiriman Arca Amoghapasa beserta empat belas pengiringnya dari Raja Kertanegara, penguasa Singasari, kepada penguasa Dharmasraya. Isi dari Prasasti ini yakni: "Bahagia! Pada tahun Saka 1208, bulan Bhadrawada (Agustus–September), hari pertama paruh terang (bulan naik), pada hari Mawulu (enam harian), Wage (pancawara), hari Kamis (saptawara), wuku Madangkungan, saat rasi bintang berada di barat daya". Peristiwa ini sering kali dimaknai secara parsial sebagai pertukaran benda sakral semata, padahal merupakan sebuah tindakan diplomatik berlapis makna yang harus dibaca dalam konteks politik dan keagamaan yang lebih luas. Pengiriman arca Amoghapasa salah satu manifestasi Bodhisattva dalam pantheon Mahayana-Vajrayana dari Kertanegara kepada penguasa Dharmasraya mengandung setidaknya tiga lapisan makna sekaligus: pertama, pengakuan Singasari atas kedudukan Dharmasraya sebagai kekuatan politik yang setara dan layak dihormati; kedua, penegasan ikatan spiritual antara dua entitas kekuasaan yang sama-sama bercorak Buddha; dan ketiga, proyeksi pengaruh kosmologis Singasari ke wilayah Sumatera dalam logika "mandala" kekuasaan yang lazim pada era tersebut. Dengan kata lain, Prasasti Padang Roco bukan sekadar dokumen diplomatik biasa, melainkan sebuah monumen yang merekam secara permanen kedudukan Dharmasraya dalam jaringan peradaban Hindu-Buddha Nusantara pada penghujung abad ke-13 (Boechari, 1979).

Dalam ranah arkeologis, peninggalan material yang tersebar di kawasan Lembah Batanghari, Padang Lawas, Rambahan, dan Tanah Datar memberikan bukti konkret atas intensitas kehidupan keagamaan dan budaya di wilayah Dharmasraya. Berbagai artefak berupa arca-arca batu, fragmen prasasti, serta sisa-sisa struktur percandian yang ditemukan di lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ritual Hindu-Buddha tidak hanya terpusat di ibu kota kerajaan, melainkan menyebar secara luas ke berbagai penjuru wilayah kekuasaan (Bambang Budi Utomo, 2018). Persebaran situs-situs arkeologis ini dapat ditafsirkan sebagai indikator yang kuat mengenai kedalaman penetrasi tradisi Hindu-Buddha ke dalam struktur sosial masyarakat Dharmasraya, sekaligus mencerminkan kemampuan kerajaan dalam mengorganisasi tenaga kerja dan sumber daya untuk mendirikan bangunan-bangunan monumental yang berfungsi sebagai pusat ritual dan representasi visual kosmologi Hindu-Buddha. Temuan-temuan artefaktual tersebut, sebagaimana dicatat oleh Bambang Budi Utomo (2018), memperkuat argumentasi bahwa kawasan Minangkabau menyimpan rekam jejak peradaban Hindu-Buddha yang tidak kalah signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara, meskipun selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam diskursus historiografi nasional.

Dari perspektif struktur kekuasaan, Kerajaan Dharmasraya mengoperasikan sistem pemerintahan yang menggabungkan legitimasi sakral berbasis kosmologi Buddha dengan pengelolaan jaringan ekonomi berbasis perdagangan. Raja atau penguasa tertinggi tidak semata-mata dipandang sebagai kepala negara dalam pengertian administratif, melainkan juga sebagai representasi kosmos di atas bumi sebuah konsep devaraja yang menempatkan penguasa sebagai titik pertemuan antara tatanan ilahi dan tatanan duniawi (Rahim, 2022). Konstruksi legitimasi seperti ini memerlukan bukti-bukti berupa monumen, prasasti, dan arca sebagai instrumen proyeksi kekuasaan yang dapat dilihat, dibaca, dan dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat. Itulah mengapa investasi Dharmasraya dalam pembangunan infrastruktur keagamaan candi, arca, dan prasasti tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi politik kekuasaan yang lebih luas.

Tinjauan Histori Kerajaan Pagaruyung: Transformasi dan Kontinuitas Peradaban Hindu-Buddha

Kemunculan Kerajaan Pagaruyung pada abad ke-14 Masehi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang lebih besar yang sedang melanda kawasan Nusantara pada periode tersebut. Runtuhnya dominasi Dharmasraya di lembah Batanghari, bersamaan dengan meluasnya pengaruh Majapahit ke wilayah Sumatera, menciptakan kekosongan kekuasaan dan sekaligus peluang reorganisasi politik yang dimanfaatkan secara cerdas oleh Adityawarman. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Adityawarman dan perannya dalam sejarah Pagaruyung memerlukan pembacaan yang cermat atas sejumlah prasasti yang ia tinggalkan. Prasasti Kubu Rajo yang berangka tahun 1340 M merupakan salah satu dokumen paling awal yang menegaskan kehadiran dan otoritas Adityawarman di kawasan Minangkabau. Prasasti Pagaruyung 1 dan 2, serta Prasasti Suruaso yang ditemukan di berbagai lokasi di Sumatera Barat, secara konsisten menggambarkan Adityawarman bukan sekadar sebagai raja, melainkan sebagai figur sakral yang menerapkan spiritual Tantrayana-Bhairawa dalam dirinya (Oktaviani, 2021). Tradisi historiografi lokal yang tersimpan dalam *Tambo Alam Minangkabau* mengaitkan pendirian Kerajaan Pagaruyung secara langsung dengan figur Adityawarman, seorang tokoh yang memiliki latar belakang genealogis sangat kompleks: di satu sisi ia terhubung dengan dinasti Singasari-Majapahit di Jawa melalui garis keturunan ibunya, dan di sisi lain ia juga memiliki ikatan darah dengan keluarga kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera. Dualitas genealogis inilah yang menjadikan Adityawarman sebagai kandidat ideal untuk memimpin sebuah kerajaan yang harus mengintegrasikan warisan dua tradisi besar peradaban Nusantara sekaligus.

Pilihan ideologis ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks yang tepat. Aliran Tantrayana-Bhairawa merupakan salah satu aliran dalam tradisi Hindu-Buddha yang menekankan aspek-aspek esoterik dari ritual keagamaan, termasuk penggunaan simbol-simbol yang bersifat transgresif dalam logika ritual ortodoks. Adopsi aliran ini oleh Adityawarman bukan merupakan Tindakan asal-asalan, melainkan sebuah kalkulasi teologis-politis yang bertujuan mengkonstruksi sebuah identitas kekuasaan yang membedakannya dari penguasa-penguasa sebelumnya dan sekaligus menegaskan posisinya sebagai figur yang melampaui batas-batas ordinari kekuasaan duniawi.



Gambar 3. Prasasti Pagaruyung
Sumber: JelajahSumbar.com

Perpindahan pusat kekuasaan dari kawasan Batanghari ke Pagaruyung di dataran tinggi Minangkabau pada sekitar tahun 1347 M menandai transformasi yang bersifat sekaligus geografis,

politis, dan simbolis. Secara geografis, pedalaman Minangkabau menawarkan posisi yang lebih defensif dan lebih dekat dengan komunitas-komunitas adat Minangkabau yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Secara politis, langkah ini menandai pergeseran orientasi kekuasaan dari model kerajaan pesisir berbasis perdagangan seperti yang dipraktikkan Dharmasraya menuju model kerajaan agraris-pegunungan yang lebih bergantung pada loyalitas komunitas lokal. Secara simbolis, penetapan Pagaruyung sebagai pusat kekuasaan baru mencerminkan upaya Adityawarman untuk mengklaim warisan budaya Minangkabau yang kaya dan mengintegrasikannya ke dalam narasi legitimasi kerajaannya (Rahim, 2022).

Dengan demikian, Pagaruyung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelanjutan Dharmasraya; ia adalah sebuah peradaban baru yang mempertahankan unsur-unsur tradisi Hindu-Buddha yang mengintegrasikan dalam konteks sosial-budaya Minangkabau yang berbeda.

Kerangka analisis Nastiti (2014) yang mengidentifikasi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mendukung maju-mundurnya peradaban Hindu-Buddha mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, agama, kesenian dalam bidang sastra, arsitektur, dan arca, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata ruang sangat relevan untuk memahami bagaimana Pagaruyung di bawah Adityawarman mengelola transformasi peradaban tersebut. Dalam aspek kesenian dan arsitektur, pendirian dan pelestarian berbagai bangunan candi serta penghasilan karya-karya pahat arca di kawasan Tanah Datar menunjukkan bahwa tradisi seni sakral Hindu-Buddha tetap terpelihara dengan baik di bawah naungan Pagaruyung. Dalam aspek keagamaan, praktek Tantrayana-Bhairawa yang diperkenalkan Adityawarman tidak berdiri dalam kekosongan, melainkan menyerap dan berinteraksi dengan praktik-praktik spiritual lokal yang telah ada sebelumnya. Dalam aspek politik, sistem pemerintahan Pagaruyung memadukan hierarki birokrasi bercorak Hindu-Buddha dengan mekanisme konsensus adat yang merupakan ciri khas tatanan sosial Minangkabau.

Kontinuitas dan Transformasi: Membaca Kesinambungan Dharmasraya–Pagaruyung

Persoalan paling mendasar yang perlu dijawab dalam kajian tentang kedua kerajaan ini adalah: sejauh mana Pagaruyung merupakan kelanjutan dari Dharmasraya, dan sejauh mana ia merupakan entitas yang sepenuhnya baru? Pertanyaan ini tidak semata-mata bersifat akademis, karena jawabannya menentukan bagaimana kita memahami karakter kesinambungan peradaban Hindu-Buddha di kawasan Minangkabau secara keseluruhan. Slamet Muljana (1981) dalam *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi* mengajukan narasi tentang kesinambungan dinasti yang menghubungkan Dharmasraya, Melayu, dan Pagaruyung dalam satu garis suksesi yang relatif berkesinambungan. Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Dobbin (1983) dan Graves (1981), penggunaan sumber-sumber lokal seperti tambo sebagai dasar rekonstruksi historis tanpa kritik metodologis yang memadai dapat menghasilkan narasi yang lebih berdimensi mitologis daripada historis.

Pendekatan yang lebih tepat adalah melihat hubungan Dharmasraya-Pagaruyung bukan sebagai suksesi linier yang mulus, melainkan sebagai transformasi berkesinambungan yang melibatkan sekaligus unsur kontinuitas maupun diskontinuitas. Unsur kontinuitas yang paling jelas adalah ideologi Hindu-Buddha sebagai basis legitimasi kekuasaan: baik Dharmasraya maupun Pagaruyung menggunakan bahasa kosmologi dan ritual Hindu-Buddha untuk mengkonstruksi dan mempertahankan otoritas politiknya. Instrumen-instrumen legitimasi seperti prasasti berbahasa Sansekerta atau Melayu Kuno, pembangunan bangunan keagamaan, serta pemeliharaan hubungan diplomatik melalui pertukaran benda-benda sakral merupakan praktik yang berlanjut dari satu kerajaan ke kerajaan berikutnya (Boechari, 1979). Dalam hal ini, Adityawarman tidak

menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru; ia mewarisi dan mengoperasikan sebuah bahasa kekuasaan yang telah terbentuk jauh sebelum kemunculannya.

Di sisi lain, unsur diskontinuitas yang paling signifikan terletak pada konteks geografis, ekologis, dan sosial yang berbeda antara Dharmasraya dan Pagaruyung. Dharmasraya beroperasi dalam ekosistem lembah sungai yang berorientasi ke perdagangan dan koneksi maritim, sementara Pagaruyung beroperasi dalam ekosistem pegunungan yang berorientasi ke komunitas-komunitas adat Minangkabau yang memiliki sistem sosial matrilineal yang kuat. Perbedaan konteks sosial-budaya tersebut mengakibatkan perlunya rekontekstualisasi praktik dan pemaknaan tradisi Hindu-Buddha agar dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan budaya yang berbeda (Rahim, 2022). Adopsi aliran Tantrayana Bhairawa oleh Adityawarman dapat dipandang sebagai upaya rekontekstualisasi tradisi Hindu-Buddha yang diwarisi dari Dharmasraya melalui integrasinya dengan sistem kepercayaan dan praktik ritual lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Minangkabau pegunungan.

Akulturasi Hindu-Buddha dengan Sistem Sosial-Budaya Minangkabau

Penelusuran genealogis terhadap sosok Adityawarman semakin menguatkan argumen mengenai posisinya sebagai jembatan peradaban antara Dharmasraya dan Pagaruyung. Berdasarkan rekonstruksi yang bersumber dari Prasasti Kuburajo dan Prasasti Padangroco, Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman, seorang pejabat tinggi Kerajaan Singasari yang turut serta dalam ekspedisi pengiriman Arca Amoghapasa pada tahun 1286 M, dan Dara Jingga, seorang puteri dari penguasa Dharmasraya, Sri Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Garis keturunan ganda inilah yang menjadikan Adityawarman bukan sosok asing yang dipaksakan dari luar, melainkan pewaris sah dari dua tradisi politik-keagamaan besar yang sebelumnya telah saling terhubung melalui jalinan diplomatik dan perkawinan dinasti. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Sunliensyar, dan Adi mengenai legitimasi kekuasaan Adityawarman berdasarkan sumber-sumber prasasti menegaskan bahwa otoritas Adityawarman dibangun secara berlapis melalui kombinasi silsilah, gelar-gelar keagamaan, dan penegasan diri sebagai penguasa Bhumi Malayu yang mewarisi Suwarnabhumi. Proses peralihan kekuasaan ini juga tidak berlangsung secara damai semata.

Kajian historis Sarbini (2014) terhadap perjuangan Adityawarman di Dharmasraya pada periode 1339–1376 menunjukkan bahwa sebelum menetapkan diri secara penuh di Pagaruyung, Adityawarman terlebih dahulu menundukkan sejumlah kekuatan lokal di sekitar Dharmasraya, termasuk Kerajaan Aru Barumun dan Kesultanan Kuntu Kampar, sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan atas warisan Sriwijaya-Dharmasraya sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman Minangkabau. Dengan demikian, transformasi Dharmasraya menuju Pagaruyung tidak hanya merupakan peristiwa simbolis-keagamaan, tetapi juga melibatkan proses politik-militer yang nyata dalam menata ulang konfigurasi kekuasaan di Sumatera bagian tengah pasca-Sriwijaya. Dimensi material dari legitimasi sakral Adityawarman juga tampak pada Arca Bhairawa yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta, sebuah arca bercorak Tantrayana berukuran hampir tiga meter yang digali dari kawasan Padang Roco, Sawahlunto. Arca ini menggambarkan figur Bhairawa dalam wujud ugra (ganas), lengkap dengan taring dan atribut-atribut menyeramkan yang merepresentasikan aspek esoterik Tantrayana-Bhairawa. Keberadaan arca berskala monumental semacam ini, yang relatif jarang ditemukan di Jawa, mengindikasikan bahwa Sumatera bagian tengah—khususnya kawasan transisi antara Dharmasraya dan Pagaruyung—merupakan salah satu pusat pemujaan Tantrayana yang signifikan dalam jaringan peradaban Hindu-Buddha Nusantara,

sekaligus menjadi medium visual bagi proyeksi kekuasaan Adityawarman sebagai personifikasi dewa pelindung yang sekaligus penguasa duniawi.

Salah satu persoalan paling kompleks dan menarik dalam kajian tentang kedua kerajaan ini adalah bagaimana tradisi Hindu-Buddha berakulturasi dengan sistem sosial dan budaya Minangkabau yang telah terbentuk jauh sebelum pengaruh India masuk ke kawasan ini. Sistem matrilineal Minangkabau yang mengatur garis keturunan, pewarisan harta, dan organisasi kekerabatan melalui garis ibu merupakan salah satu sistem sosial yang paling bertahan lama dan paling kokoh di seluruh Nusantara. Fakta bahwa sistem ini tidak hanya bertahan, tetapi bahkan semakin menguat pada periode-periode berikutnya, menunjukkan bahwa proses akulturasi Hindu-Buddha di Minangkabau bersifat selektif dan negosiatif, bukan asimilatif total (Bambang Budi Utomo, 2018). Masyarakat Minangkabau, dalam hal ini, bukanlah objek pasif dari penetrasi budaya India; mereka adalah agen-agen aktif yang secara selektif menyerap, mengadaptasi, dan mentransformasi unsur-unsur Hindu-Buddha sesuai dengan kerangka nilai dan sistem sosial yang mereka miliki.

Proses akulturasi ini juga terefleksikan dalam tradisi sastra dan keaksaraan yang berkembang di kawasan Minangkabau. Penelitian Kozok (2006) tentang naskah-naskah Melayu Kuno membuka perspektif penting mengenai bagaimana tradisi keaksaraan berbasis aksara India diserap dan dikembangkan dalam konteks lokal Minangkabau. Naskah-naskah tersebut tidak sekadar mereproduksi teks-teks India secara verbatim, melainkan menjadi wahana untuk mengekspresikan narasi-narasi lokal dalam medium yang dipinjam dari tradisi India. Dalam konteks Pagaruyung khususnya, tradisi *tambo* sebagai genre sastra sejarah lokal merupakan contoh paling gamblang dari proses kreatif akulturasi ini: ia menggunakan konvensi-konvensi naratif yang sebagian terpengaruh oleh tradisi India, tetapi untuk mengisahkan genealogi, kosmologi, dan identitas yang sangat spesifik Minangkabau (Kozok, 2006). Kajian-kajian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Andalas dan Balai Arkeologi Sumatera Barat dalam beberapa dekade terakhir telah semakin memperkaya pemahaman tentang dimensi lokal dari proses akulturasi ini, meskipun sintesis yang menyeluruh antara temuan-temuan arkeologis dan analisis teks masih sangat dibutuhkan.

Aspek tata ruang dan arsitektur juga menjadi medan akulturasi yang penting. Situs-situs percandian yang tersebar di kawasan Lembah Batanghari, Rambahan, dan Tanah Datar tidak hanya mencerminkan adopsi teknologi bangunan batu dari tradisi India, tetapi juga menunjukkan adaptasi yang signifikan dalam hal orientasi, dekorasi, dan fungsi ritual yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Nastiti, 2014). Pola persebaran situs-situs arkeologis ini juga mencerminkan logika tata ruang kekuasaan yang spesifik: pusat-pusat sakral ditempatkan pada lokasi-lokasi yang secara topografis memiliki signifikansi simbolis dalam kosmologi lokal puncak-puncak bukit, pertemuan sungai, atau kawasan yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual sehingga arsitektur Hindu-Buddha menjadi bagian dari lanskap sakral yang sudah ada, bukan sesuatu yang asing yang diimposisikan dari luar.

Signifikansi Historiografis dan Relevansi Kontemporer

Kajian komprehensif tentang Kerajaan Dharmasraya dan Pagaruyung memiliki signifikansi yang melampaui kepentingan akademis sempit. Dalam konteks historiografi nasional Nusantara, kedua kerajaan ini merepresentasikan sebuah tradisi peradaban yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi narasi Jawa-sentris dalam penulisan sejarah Indonesia. Sebagaimana diargumentasikan oleh Rahim (2022), kecenderungan historiografi nasional untuk berpusat pada dinamika kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa telah mengakibatkan marginalisasi kontribusi

peradaban Melayu di Sumatera, padahal peradaban Melayu dengan Sriwijaya, Dharmasraya, dan Pagaruyung sebagai simpul-simpul utamanya memainkan peran yang sama pentingnya dalam pembentukan identitas peradaban Nusantara secara keseluruhan. Merekonstruksi sejarah Dharmasraya dan Pagaruyung secara komprehensif dan kritis, oleh karena itu, merupakan kontribusi yang bersifat korektif terhadap bias-bias yang selama ini mewarnai historiografi nasional.

Lebih dari sekadar kepentingan historiografis, pemahaman yang lebih baik tentang masa Hindu-Buddha di Minangkabau juga memiliki relevansi langsung bagi upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya. Situs-situs arkeologis di kawasan Dharmasraya dan Tanah Datar yang terkait dengan kedua kerajaan merupakan warisan budaya yang bersifat tak ternilai, baik dalam pengertian akademis maupun dalam pengertian identitas komunal masyarakat Minangkabau kontemporer. Kerangka analisis integratif yang menempatkan Prasasti Padang Roco, Prasasti Suruaso, dan Prasasti Kuburajo sebagai bukti material dari satu lintasan peradaban yang berkesinambungan dapat menjadi landasan akademis yang kokoh bagi pengembangan kebijakan pelestarian yang lebih terarah dan komprehensif (Nastiti, 2014). Dengan demikian, kajian tentang Dharmasraya dan Pagaruyung bukan hanya tentang masa lalu yang telah berlalu, melainkan juga tentang bagaimana komunitas-komunitas masa kini memahami, merawat, dan mewariskan jejak-jejak peradaban yang telah membentuk identitas mereka kepada generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Kajian ini telah membuktikan bahwa Kerajaan Dharmasraya dan Kerajaan Pagaruyung membentuk satu lintasan peradaban Hindu-Buddha yang berkesinambungan di kawasan Minangkabau, meskipun keduanya beroperasi dalam konteks geografis dan sosial-budaya yang berbeda. Dharmasraya membangun legitimasi kekuasaannya melalui integrasi kosmologi Buddha dengan pengendalian jaringan perdagangan di sepanjang Sungai Batanghari, sebagaimana terdokumentasikan dalam Prasasti Padang Roco (1286 M). Sementara itu, Pagaruyung di bawah Adityawarman merepresentasikan transformasi peradaban yang bersifat politis, geografis, dan teologis sekaligus, ditandai oleh adopsi aliran Tantrayana-Bhairawa sebagai instrumen legitimasi sakral dalam ekosistem agraris-pegunungan Minangkabau. Dengan demikian, hubungan antara kedua kerajaan tidak dapat dipahami sebagai suksesi linier yang mulus, melainkan sebagai transformasi berkesinambungan yang memuat unsur kontinuitas sekaligus diskontinuitas yang signifikan.

Proses akulturasi Hindu-Buddha dengan sistem matrilineal dan tradisi *tambo* Minangkabau terbukti bersifat selektif dan negosiatif. Masyarakat Minangkabau tidak berperan sebagai objek pasif penetrasi budaya India, melainkan sebagai agen aktif yang secara kreatif menyerap, mengadaptasi, dan mentransformasi unsur-unsur Hindu-Buddha sesuai dengan kerangka nilai dan sistem sosial yang telah mengakar. Hal ini tercermin secara nyata dalam tradisi keaksaraan, arsitektur percandian, serta tata ruang situs-situs sakral yang menunjukkan perpaduan organik antara tradisi India dan lokalitas Minangkabau, di mana arsitektur Hindu-Buddha tidak diimposisikan dari luar, melainkan menjadi bagian integral dari lanskap sakral yang telah ada sebelumnya.

Secara historiografis, kajian ini memberikan kontribusi korektif terhadap penulisan sejarah nasional, dengan menegaskan bahwa peradaban Melayu-Minangkabau melalui Dharmasraya dan Pagaruyung memainkan peran yang sama pentingnya dalam pembentukan identitas peradaban

Nusantara secara keseluruhan. Lebih dari itu, pemahaman yang komprehensif dan integratif atas kedua kerajaan ini memiliki relevansi langsung bagi upaya pelestarian situs-situs warisan budaya di kawasan Dharmasraya dan Tanah Datar, sekaligus menjadi landasan akademis yang kokoh bagi pengembangan kebijakan kebudayaan yang lebih terarah dan berkeadilan historis bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kern, H. 1877. "Het opschrift van Batoe Beragoeng opniew onderzoek", dalam BKI 4e Volg., dl. I. 1917a, "Nog iets over't opschrift van Pagarruyung in Menangkabau (1278 Çāka)", Verspreide Geschriften, VI, hlm. 265-275

Mulyadi, S., Yondri, L., Mutia, R., & Esda, E. (1993/1994). *Replika arca Adityawarman koleksi Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat "Adityawarman"*. Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat. (Kemdikbud Repository)

Putra, FD, & Basri, W. (2023). Museum Adityawarman Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Indonesia. Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah, 11(1), 42–58. https://doi.org/10.23887/jjps.v11i1.59181

Artikel

Africon, Januar & Usman, Robby. (2024). Perancangan Buku Ilustrasi Sejarah Delapan Belas Prasasti Adityawarman. Jurnal Desain Komunikasi Kreatif, No. 2(Vol.6), hal 250-258. https://judikatif-upiyptk.org/ojs.

Anggraini, R., & Aliyah, S. (2020). Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai perlindungan sosial keluarga pada masyarakat Minangkabau. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/16403

Ernawati. Akulturasi sistem kewarisan: Penyelesaian sengketa pusaka tinggi di Minangkabau. Lex Jurnalica. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2076

Farhan, M., Raharjo, W., & Hadi, D. S. N. (2023). *Sense of place kawasan Nagari Pagaruyung sebagai narasi ruang Kerajaan Pagaruyung (Sense of Place Nagari Pagaruyung Area as Space Narrative Pagaruyung Kingdom).* Universitas Islam Indonesia https://jurnal.um-palembang.ac.id/arsir/article/viewFile/4973/3333.

Istiawan, B. (2006). *Selintas prasasti dari Melayu Kuno*. Medan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar. Repositori Kemendikdasmen PDFJaya, I. B. S. *Penelusuran Sejarah Kerajaan Dharmasraya di Sumatera Barat.* Universitas Udayana

Marzali, A. (2023). *Sejarah awal Kerajaan Melayu di Jambi (The Early History of the Malay Kingdom in Jambi). Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS)*, 34(2), 65–80. https://doi.org/10.22452/jomas.vol34no2.5

Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Adi, A. M. W. *Legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti (The Legitimacy of Ādityawarman's Sovereignty in Malayu Kingdom Based on the Inscriptions).* Universitas Jambi https://repository.unja.ac.id/86323/1/Legitimasi_Kekuasaan_Adityawarman_di_Ker.pdf.

Rahmawati, N., Susanti, L. R., & Hudaidah. (2024). *Warisan Kerajaan Pagaruyung: Studi historis-antropologis*. *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya*, 2(2), 40. Universitas Sriwijaya https://doi.org/10.62176/bastoria.v2i2.456.

Ramadhan, A. H. R., Susanti, R., & Hudaidah. (2025). Dinamika kuasa adat, kekerabatan, dan kemunduran budaya: Studi kritis atas transformasi sosial di nagari peninggalan Kerajaan Pagaruyung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, *20*(1). Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan

Rahim, A. (2022). *Kerajaan Melayu Kuno: Tinjauan sejarah Jambi hingga abad 13*. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(1), 172–183. Universitas Batanghari https://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/article/view/288/462.

Sarbini, C. R. (2014). Perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara tahun 1339–1376 (Skripsi). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/1848/

Utomo, B. B., & Sudarman. (2018). *Tinggalan budaya masa pengaruh kebudayaan India dan penulisan sejarah kebudayaan Minangkabau*. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 22(2), 73–88. https://doi.org/10.37108/tabuah.v22i2.26